

Analysis Of The Influence Of Minimum Wages, GRDP, Open Unemployment Rate, And Poverty Level On Community Welfare In The Regency/City Of The Special Region Of Yogyakarta

Analisis Pengaruh Upah Minimum, PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Sheila Amelia Putri^{1*}

Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

b300220155@student.ums.ac.id^{1*}

**Corresponding Author*

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and analyze various factors that can affect the welfare of the community in various districts and cities in the Special Region of Yogyakarta (DIY). This study uses quantitative data collection; panel data analysis was conducted from 2017–2024. This data was obtained from journals, previous research, and the Central Statistics Agency (BPS). In this study, cross-section data covers four districts and one city in the Special Region of Yogyakarta (DIY). Time series data was taken from 2017–2024. In this study, the dependent variable is Community Welfare, as measured by the Human Development Index. While the dependent variables are the Regency/City Minimum Wage (UMK), Gross Regional Domestic Product (GRDP), Open Unemployment Rate (TPT), and Poverty Level. These four independent variables are linked to the Human Development Index of the Special Region of Yogyakarta. This research is also expected to assist the government in improving the welfare of the people of DIY.

Keywords: *Community Welfare, Minimum Wage, Gross Regional Domestic Product, Open Unemployment Rate, Poverty Rate, Special Region of Yogyakarta.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini menggunakan pengambilan data kuantitatif; analisis data panel dilakukan dari tahun 2017–2024. Data ini diperoleh dari jurnal, penelitian terdahulu, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam penelitian ini, data *cross-section* meliputi empat kabupaten dan satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data *time series* diambil dari tahun 2017–2024. Pada penelitian ini, variabel dependen adalah Kesejahteraan Masyarakat, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel dependennya adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kemiskinan. Keempat variabel independen tersebut dihubungkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY.

Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan Konsep Kesejahteraan dikembangkan untuk mengukur aspek pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk nominal. Kesejahteraan mencakup standar hidup, rasa bahagia, tingkat kesejahteraan, serta kualitas hidup seseorang. Menurut Brudeseth (2015) kesejahteraan adalah kepuasan terhadap kualitas hidup, yang mencakup beberapa hal seperti (a) kesejahteraan material, (b) kesejahteraan sosial, (c) kesejahteraan spiritual, dan (d) rasa aman. Kesejahteraan sosial dapat dipandang sebagai ukuran kemakmuran daerah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan manusia merupakan salah satu hal

penting dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan manusia mencerminkan peningkatan dan transformasi menuju taraf kesejahteraan yang lebih baik. Proses ini seharusnya berlangsung di berbagai dimensi kehidupan, mencakup bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, hingga lingkungan. Dengan demikian, inti dari pembangunan manusia terletak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan individu itu sendiri (Priyono et al., 2025). Kesejahteraan sangat subjektif dan memiliki banyak pengertian berbeda, dimana orang-orang mempunyai kebijakan, tujuan, dan gaya hidup yang berbeda dalam menentukan tingkat kesejahteraan mereka (Teneh et al., 2019). Tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunannya. Kesejahteraan mencakup aspek rasa aman, perlindungan, serta kemakmuran hidup. Menurut Poerwadarminta (2003), istilah *sejahtera* menggambarkan suatu kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan tenteram dan berkecukupan. Dengan kata lain, kesejahteraan dapat dikatakan tercapai apabila kebutuhan akan rasa aman serta taraf hidup yang layak terpenuhi secara seimbang. Indeks pembangunan manusia adalah alat yang digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat sebuah wilayah.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2024

Tahun	IPM
2017	78,89
2018	79,53
2019	79,99
2020	79,95
2021	80,22
2022	80,65
2023	81,09
2024	81,62

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1 merupakan tren perkembangan indeks pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari tahun 2017-2024. Tabel tersebut menunjukkan peningkatan IPM secara konsisten. Dari tahun 2017-2024, indeks pembangunan manusia di DIY mengalami peningkatan berkelanjutan naik dari 78,89 menjadi 81,62. IPM adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, baik masyarakat maupun penduduk. IPM secara khusus mengukur pencapaian dalam pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup manusia. Keempat komponen tersebut adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, yang diukur dengan rata-rata pengeluaran per orang sebagai indikator pendapatan; kemajuan dalam pendidikan diukur dengan tingkat melek huruf, partisipasi dalam sekolah, dan lama sekolah; dan capai masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, yang diukur dengan rata-rata pengeluaran per orang sebagai indikator (BPS, 2007).

Pemerintah dapat meningkatkan angka pada IPM melalui kebijakan penetapan UMK. Upah adalah uang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya sebagai imbalan atas pekerjaan atau layanan yang telah mereka lakukan. Upah ditetapkan dalam bentuk uang dan ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja yang berlaku, yang juga mencakup tunjangan untuk diri sendiri dan anggota keluarga (Susanti, 2019). Upah minimum adalah batas bawah yang ditetapkan oleh perusahaan atau industri untuk membayar pekerja mereka (Putri & Putri, 2021).

Tabel 2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (rupiah) Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	UMK
2017	1.337.645
2018	1.454.154
2019	1.570.923

2020	1.704.608
2021	1.765.000
2022	1.840.916
2023	1.981.782
2024	2.125.898

Sumber: BPS

UMK yang dikonversikan dalam rupiah di Provinsi DIY tahun 2017-2024 pada tabel 2 terlihat bahwa pada tahun 2017 sebesar Rp. 337.645 hingga tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 125.898. Dalam tabel tersebut diketahui bahwa UMK Provinsi DIY akan naik setiap tahunnya. Upah harus ditingkatkan agar kualitas hidup pekerja dan keluarganya bisa meningkat. Upah bisa diberikan sesuai dengan lama waktu yang dihabiskan atau jumlah barang yang berhasil dibuat oleh pekerja. Oleh karena itu, semakin tinggi upah yang diberikan kepada pekerja maka semakin tinggi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai indikator ekonomi maupun sosial dapat digunakan untuk memantau kemajuan kesejahteraan di suatu wilayah. Untuk masyarakat sebagai objek pembangunan, Indikator diperlukan untuk mengukur kemajuan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3. PDRB (ribu rupiah) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	PDRB
2017	24.534
2018	25.776
2019	27.010
2020	27.754
2021	29.116
2022	30.411
2023	31.748
2024	33.140,14

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan data dari (BPS) yang menjelaskan bahwa pada tahun 2024, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DIY diukur dengan harga yang tetap pada tahun 2010, mencapai rata-rata 33.120,14 ribu rupiah. Pada tahun 2017 tercatat pertumbuhan PDRB lebih rendah dari tahun-tahun yang lain, yaitu 24.534 ribu rupiah. Proses peningkatan dan pemulihan keadaan ekonomi suatu negara atau daerah secara bertahap disebut sebagai perkembangan ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan salah satu hambatan bagi kesejahteraan masyarakat. Perkuat sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Organisasi Perubahan Dunia (ILO) memiliki rencana untuk mengurangi pengangguran dengan merancang program untuk menambah lapangan kerja. Salah satu cara yang digunakan untuk menentukan tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Muliyawati & Sasana, 2022).

Tingkat kemiskinan adalah faktor lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan sosial dan ekonomi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang dasar untuk bertahan hidup dengan martabat yang lebih tinggi. Kebutuhan dasar ini dapat dipenuhi dengan cara yang lebih sederhana, seperti kebutuhan pokok digunakan untuk menjaga kehidupan, seperti sandang, pangan, sekolah, pekerjaan, dan tempat tinggal. Kemiskinan digolongkan menjadi 2 bagian yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang dianggap kemiskinan absolut ketika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka (Atina & Setyowati, 2022).

Tabel 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) dan Tingkat Kemiskinan (persen) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Kemiskinan
2017	3,02	13,02
2018	3,35	12,13
2019	3,14	11,70
2020	4,57	12,28
2021	4,56	12,80
2022	4,06	11,34
2023	3,69	11,04
2024	3,48	10,83

Sumber: BPS

Pada tabel diatas bisa diamati bahwa data tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di DIY cenderung berfluktuasi. Menurut Estrada dan Wenagama (2022), Penelitian ini menunjukkan hubungan yang kuat antara tingkat pengangguran dan kemiskinan. Artinya, ketika tingkat pengangguran meningkat, jumlah orang yang dianggap miskin juga meningkat, dan sebaliknya, ketika tingkat pengangguran turun, jumlah orang yang dianggap miskin juga berkurang. Ketersediaan pekerjaan yang terbatas dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk menyebabkan pengangguran sebuah persoalan yang mengganggu kestabilan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Jika tidak ditangani, pengangguran dapat memperlambat perekonomian dan menimbulkan dampak sosial negatif, antara lain meningkatnya kejahatan (Waluyaning Putra & Faridatussalam, 2023). Namun, informasi diatas menunjukkan pandangan yang berbeda mengenai hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. Dijelaskan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak selalu mampu mengurangi jumlah penduduk yang miskin di Indonesia, dan sebaliknya. Pada tahun 2017 terjadi penurunan tingkat pengangguran 3,02% tetapi angka kemiskinan di Provinsi DIY mengalami peningkatan 13,02%. Di tahun-tahun berikutnya menunjukkan tingkat pengangguran naik tetapi tingkat kemiskinan turun.

Kesejahteraan masyarakat sangat penting bagi kehidupan dimana pekerja melakukan pekerjaan untuk memenuhi hidup dirinya sendiri maupun keluarganya. Berdasarkan latar belakang di atas menimbulkan minat dan ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Upah Minimum, PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upah minimum, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif guna meningkatkan upah minimum, Meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi tingkat pengangguran, dan memberikan pemahaman mengenai berbagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tinjauan Pustaka

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan kondisi kehidupan sosial, material, dan spiritual yang memberikan rasa aman, bermoral, dan tenteram bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan fisik, rohani, dan sosial. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu negara atau wilayah. IPM dihitung melalui tiga aspek utama, yaitu usia harapan hidup sebagai cerminan derajat kesehatan, tingkat pendidikan yang diukur dari kemampuan membaca dan rata-rata lama sekolah, serta kemampuan daya beli sebagai indikator standar hidup masyarakat (Mulia &

Saputra, 2020). Pembangunan manusia sendiri merupakan proses pemberdayaan yang memperluas pilihan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan dasar agar dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang pembangunan. Empat komponen utamanya mencakup produksi, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan, di mana peningkatan kemampuan individu diharapkan dapat mendorong produktivitas, kreativitas, serta menjadikan manusia sebagai agen pertumbuhan yang efektif (BPS, 2012).

Upah Minimum Kabupaten/Kota

Menurut Sukirno (2005), upah merupakan pembayaran yang diterima tenaga kerja dari pengusaha sebagai imbalan atas jasa yang diberikan dalam memenuhi faktor produksi perusahaan. Senada dengan itu, Gilarso (2003) mendefinisikan upah sebagai balas jasa kepada tenaga kerja, meliputi gaji, lembur, tunjangan, dan honorarium sesuai kebutuhan perusahaan. Penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) memiliki peran penting dalam menjamin kompensasi layak bagi pekerja serta mendorong penguatan ekonomi daerah. Susanto dan Wenagama (2022) menemukan bahwa UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali, di mana peningkatan upah minimum mendorong terpenuhinya kebutuhan hidup layak dan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Chalid dan Yusuf (2014) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi upah minimum suatu daerah, semakin baik tingkat pembangunan manusianya, sehingga upah minimum terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

Produk Domestik Regional Bruto

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha atau nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh pelaku ekonomi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Menurut Karenina et al. (2022), PDRB mencerminkan total akumulasi nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut. Perhitungan PDRB berdasarkan harga berlaku memuat nilai barang dan jasa pada tingkat harga yang sedang berlaku di tahun pengukuran, sedangkan perhitungan menggunakan harga konstan menyesuaikan nilai dengan tingkat harga pada tahun dasar sehingga hasilnya bebas dari pengaruh inflasi. Dari sisi fungsi, PDRB harga berlaku digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan perbandingan nominal antarsektor, sementara PDRB harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, baik secara tahunan maupun triwulanan (Permadi & Chrystanto, 2021).

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kondisi tingkat pengangguran, karena meningkatnya pengangguran akan menurunkan pendapatan masyarakat dan berdampak negatif terhadap kesejahteraan (Rahayu et al., 2021). Menurut Sukirno (2006), pengangguran adalah keadaan ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan, dan hal ini menjadi permasalahan ekonomi yang sulit dihindari. Tingginya pengangguran mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga tenaga kerja tidak mampu bersaing di pasar kerja (Fatimah & Prihadi Utomo, 2023). Berdasarkan karakteristiknya, Sukirno (2006b) membedakan pengangguran menjadi empat jenis, yaitu: pengangguran tersembunyi, musiman, setengah menganggur, dan pengangguran terbuka yang muncul ketika lapangan kerja tidak bertambah sebanding dengan jumlah pencari kerja. Menurut Keynes (1936), penyebab utama pengangguran adalah rendahnya permintaan agregat yang mendorong penurunan produksi dan pengurangan tenaga kerja. Dampak pengangguran tidak hanya merugikan perekonomian tetapi juga kesejahteraan individu dan sosial masyarakat. Penelitian Chalid & Yusuf (2014) menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat

di Provinsi Riau. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Shavira et al. (2021) yang menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur.

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Menurut Nurkse (1971) dalam teori *vicious cycle of poverty*, kemiskinan merupakan kondisi yang saling berkaitan dan terus berulang sehingga membuat suatu negara sulit keluar dari jeratan kemiskinan. Rendahnya pendapatan masyarakat menjadi penyebab utama, karena menghambat kemampuan untuk menabung dan berinvestasi. Hasil penelitian Dwi Krisna (2022) berjudul “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali*” menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingginya jumlah penduduk miskin di suatu daerah mencerminkan ketimpangan hasil pembangunan dan menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam studi ini, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data dan mengetahui signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti atau perbedaan kelompok. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diolah oleh pihak ketiga dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menganalisis data, peneliti ini menggunakan teknik regresi data pada model data panel. Model data panel ini menggabungkan data *cross-section* dari empat Kabupaten dan satu Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2017 hingga 2024. Dalam penelitian ini, IPM adalah variabel terikat, sedangkan UMK, PDRB harga konstan, TPT, dan TK adalah variabel bebas.

Spesifikasi model yang digunakan dapat dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log UMK_{it} + \beta_2 \log PDRB_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 \log TK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota (rupiah)
- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (ribu rupiah)
- TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
- TK = Tingkat Kemiskinan (persen)
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1, \dots, \beta_4$ = Koefisien Variabel
- ε = Error Term
- i = Kabupaten/Kota DIY
- t = Tahun (2017-2024)

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah regresi data panel, ada tiga model regresi utama yaitu, *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pada pemilihan model regresi yang terbaik dilakukan melalui *Uji Chow* dan *Uji Hausman*. *Uji Chow* berfungsi untuk menentukan apakah model CEM atau FEM yang lebih tepat, sedangkan *Uji Hausman* digunakan untuk membandingkan akurasi antara model FEM atau REM.

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis regresi linier yang dilakukan dengan bantuan *EViews 10* menghasilkan tiga bentuk model estimasi, yakni model *common effect*, model *fixed effect*, serta model *random effect*, yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Regresi CEM, FEM, dan REM

Variabel	Koefisien Regresi		
	CEM	FEM	REM
C	4.896878	-1.956324	4.896878
LOG(UMP)	2.070769	6.498620	2.070769
LOG(PDRB)	3.141933	-0.069155	3.141933
TPT	2.065858	-0.089999	2.065858
LOG(TK)	1.063413	-2.565262	1.063413
R-square	0,736614	0,999040	0,736614
Prob F-statistik	0,000	0,000	0,000

Uji Chow

Cross-section F(4,31) = 2118.677823; Prob. F = 0,000

Uji Hausman

Cross-section random $\chi^2(4) = 8474.711288$; Prob $\chi^2 = 0,000$

Sumber: BPS, diolah

Setelah dilakukan estimasi menggunakan tiga pendekatan, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), selanjutnya dilakukan dua jenis pengujian untuk menentukan model yang paling tepat dalam analisis data panel. Uji Chow diterapkan untuk membedakan antara model CEM dan FEM, sedangkan Uji Hausman digunakan untuk menilai perbandingan antara FEM dan REM. Berdasarkan hasil Uji Chow, diperoleh nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga hipotesis nol ditolak. Dengan demikian, model FEM dinilai lebih cocok digunakan dibandingkan dengan CEM. Selanjutnya, hasil Uji Hausman memperoleh nilai probabilitas chi-square sebesar $0,000 < 0,05$, yang juga mengindikasikan penolakan H_0 dan menegaskan bahwa FEM merupakan model terbaik untuk digunakan dalam estimasi data panel. Setelah pemilihan model, dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. H_0 menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan H_0 ditolak apabila nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$).

Tabel 6. Hasil Regresi FEM

$IPM_{it} = -1,956324 + 6,498620\log UMP_{it}^* - 0,069155\log PDRB_{it} - 0,089999TPT_{it}^{***} - 2,565262\log TK_{it}^{**}$	
$R^2 = 0,999040$; $F\text{-stat} = 4032.842$ Prob. $F\text{-stat} = 0,000$	

Nilai probabilitas F yang tercantum dalam tabel (0,000) lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, sehingga hipotesis nol tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel UMK, PDRB, TPT, dan TK berpengaruh bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2017–2024.

Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,999040 yang berarti 99,904% variasi IPM disebabkan oleh variasi dari jumlah UMK, PDRB, TPT, dan TK, sisanya yaitu sebesar 0,096% disebabkan dari variabel lain di luar model terestimasi.

Tabel 7. Hasil uji t

Variabel	Koefisien	Prob. t	Kesimpulan
LogUMK	6,498620	0,0000	β_1 signifikan pada α 0,01
LogPDRB	-0,069155	0,5134	Tidak Signifikan
TPT	-0,089999	0,0807	β_3 signifikan pada α 0,1
LogTK	-2,565262	0,0059	β_4 signifikan pada α 0,01

Tabel diatas menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Variabel TPT dan TK berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan PDRB tidak berpengaruh.

Pengaruh Antara Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Koefisien regresi variabel UMK sebesar 6,498620 dengan pola hubungan antara UMK dan IPM adalah log-lin dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,01$, yang menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya, setiap peningkatan UMK sebesar 1% akan meningkatkan IPM sebesar 0,0649862%. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto & Wenagama (2022) yang menemukan bahwa Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kenaikan upah minimum regional berpotensi meningkatkan standar hidup yang layak, sehingga berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, besaran upah minimum memungkinkan pekerja untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, serta kebutuhan harian lainnya. Akibatnya, daya beli masyarakat pun cenderung meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Suhandi, 2020).

Pengaruh Antara Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Koefisien regresi untuk variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat $-0,089999$ dalam model hubungan linier-linier; dengan tingkat signifikansi $0,0807$ ($p < 0,10$) hal ini mengindikasikan arah pengaruh negatif — yakni setiap kenaikan TPT sebesar 1 persen berasosiasi dengan penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekitar $0,08999$ poin. Namun, dalam konteks penelitian ini pengaruh tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan statistik yang memadai sehingga hasilnya tidak mendukung hipotesis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muliawati & Sasana (2022) yang juga melaporkan tidak adanya dampak signifikan antara TPT dan IPM. Secara teoretis, pengangguran diperkirakan menurunkan kesejahteraan penduduk ketika tingkat pengangguran meningkat, kapasitas rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan menurun, yang pada gilirannya menurunkan IPM (Si'lang et al., 2019).

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Koefisien regresi TK sebesar $-2,565262$ (model log-lin) disertai nilai p $0,0059$, menandakan pengaruh negatif yang signifikan pada IPM pada level 1%. Secara praktis, setiap peningkatan TK satu persen dikaitkan dengan penurunan IPM kira-kira $0,2565262\%$.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulia & Putri (2022) dengan hasil penelitian kemiskinan berdampak negatif pada Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota di Sumatera Barat. Mereka yang memiliki penghasilan rendah hanya menggunakan uang mereka untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka, dan sebagai akibatnya, mereka tidak dapat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Selain itu, ketidaksamaan upah di seluruh kabupaten kota menyebabkan masalah karena upah minimum masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2017–2024 dengan menitikberatkan pada empat variabel utama, yakni Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta

Tingkat Kemiskinan (TK). Kesejahteraan masyarakat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator yang mencerminkan mutu pembangunan manusia sekaligus kemajuan perekonomian daerah. Melalui analisis dengan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)* pada data panel, ditemukan bahwa variabel UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, menandakan bahwa peningkatan upah minimum mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, variabel PDRB tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sementara TPT dan TK berpengaruh negatif serta signifikan, mengindikasikan bahwa meningkatnya pengangguran dan kemiskinan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kesejahteraan secara komprehensif—tidak hanya melalui kebijakan upah, tetapi juga lewat penguatan sektor ekonomi, perluasan lapangan kerja, serta program pengentasan kemiskinan yang berkesinambungan.

Daftar Pustaka

- Atina, N., & Setyowati, E. (2022). Tingkat kemiskinan di Karesidenan Madiun dengan data panel. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(1), 89–99. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i1.9987>
- BPS. (2012). *Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2011* (pp. 1–51).
- Brudeseth. (2015). *A Social Workes Guide to Working In School*. Adelaide: Australian A Ssociation of Social Workes.
- Chalid, N., & Yusuf, Y. (2014). Pengaruh tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, upah minimum kabupaten/kota dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 1–12. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/2592/2547%0A>
- Dwi Krisna, M. P. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(6), 2333. <https://doi.org/10.24843/eep.2022.v11.i06.p11>
- Fatimah, S., & Prihadi Utomo, Y. (2023). Analisis pengaruh jumlah angkatan kerja, upah minimum, penanaman modal dalam negeri, proporsi pdrb sektor industri, proporsi pdrb sektor jasa terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(3), 355–363.
- Gilarso, T. S. (2003). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*.
- Karenina, S., jdep, M., & jdep, S. (2022). Analisis produk domestik regional bruto kawasan Gerbangkertosusila Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 57–68. <https://doi.org/10.33005/jdep.v5i1.317>
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*.
- Manusia, P., Tingkat, D. A. N., & Wenagama, I. W. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemiskinan dengan belanja daerah sebagai variabel *intervening* di Kabupaten Malang. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 21(2), 233–261. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v21i2.7618>
- Mulia, R. A., & Putri, R. P. (2022). Pengaruh tingkat kemiskinan dan produk domestik regional bruto terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 22–33. <https://doi.org/10.69989/68ye6x37>
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang. *Jurnal EL-RIYASAH*, 11(1), 67. <https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>
- Muliyawati, A., & Sasana, H. (2022). Analisis determinan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 5(1), 104–124. <https://doi.org/10.56354/jendelainovasi.v5i1.116>

- Nurkse, R. (1971). The theory of development and the idea of balanced growth. *Developing the Underdeveloped Countries*, 115–128. https://doi.org/10.1007/978-1-349-15452-4_9
- Permadi, E., & Chrystanto, E. (2021). Pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto (pdrb), dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2018. *OECOMICUS Journal of Economics*, 5(2), 86–95. <https://doi.org/10.15642/oje.2021.5.2.86-95>
- Priyono, N., Arifah, S., Wulandari, E., & Prasetyanto, P. K. (2025). The determinants of level of society welfare within fiscal decentralization framework in regional autonomy era. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 60–70. <https://doi.org/10.23917/jep.v21i2.10545>
- Pusat, B., & Jakarta, S. (2007). *Indeks Pembangunan Manusia ht tp w w w ht tp*.
- Putri, E. M., & Putri, D. Z. (2021). Upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 106. <https://doi.org/10.24036/ecosains.11564057.00>
- Rahayu, H. C., Purwantoro, P., & Setyowati, E. (2021). Measuring the Effect of Inequality and Human Resource Indicators to Poverty Density in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(2), 153–160. <https://doi.org/10.23917/jep.v22i2.13631>
- Shavira, S. O., Balafif, M., & Imamah, N. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur tahun 2014-2018. *Bharanomics*, 1(2), 93–103. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.158>
- Si'lang, I. L. S., Hasid, Z., & Priyagus. (2019). Analysis of factors that influence the human development index. *Jurnal Manajemen*, 11(2), 159–169. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JURNALMANAJEMEN>
- Suhandi, H. W. dan S. O. (2020). *Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*. 85–94.
- Sukirno, S. (2005). *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*. Edisi 3. PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006a). *Ekonomi pembangunan: proses, masalah, dan dasar kebijakan*. Kencana (Prenada Media).
- Sukirno, S. (2006b). *Makroekonomi Teori Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Susanti, E. (2019). Pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan dalam perspektif ekonomi islam tahun 2008-2017. *Skripsi*, 1(1), 1–148.
- Susanto, F. V., & Wenagama, I. W. (2022). Analisis kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Bali saat pandemi covid-19. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(9), 3667. <https://doi.org/10.24843/eep.2022.v11.i09.p14>
- Teneh, E. G., Kumenaung, A. G., & Naukoko, A. T. (2019). Dampak upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat Di Pulau Sulawesi (2014-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04), 72–83.
- W. J. S. Poerwadarminta. (2003). *Kamus umum Bahasa Indonesia* (Ed. 3 View). Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Waluyaning Putra, B. R., & Faridatussalam, S. R. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Eks Karesidenan Surakarta Periode 2017-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 584. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.703>